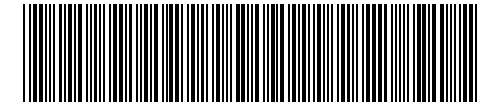




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.667794/2021**



DS:4272-2880-2987-7376

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | Ditjen Pemasarakatan |
| 3. Provinsi | : (34) | SULAWESI BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (667794) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT |
| Sebesar | : Rp. 859.294.000 | (DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	859.294.000
Rp.	859.294.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	859.294.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MAMUJU | (178) Rp. | 859.294.000 |
|----------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



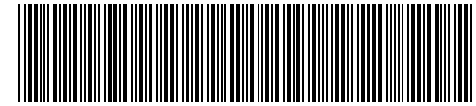
DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	859.294.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	859.294.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Jumlah Layanan Perkantoran	
	: 3. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	
	: 4. 01	Jumlah UPT Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasarakatan	
	: 5. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 6. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 7. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 8. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 9. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 10. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 11. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 12. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
	: 13. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	
	: 14. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 15. 02	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 16. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 17. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 18. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 19. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 20. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 21. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	
	: 22. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- | | |
|--------|---|
| 23. 03 | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal |
| 24. 03 | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum |
| 25. 03 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib |
| 26. 03 | Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya |
| 27. 03 | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan |
| 28. 03 | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan |
| 29. 03 | persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar |
| 30. 04 | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) |
| 31. 04 | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin |
| 32. 04 | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani |
| 33. 04 | Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal |
| 34. 04 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas |
| 35. 04 | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu |
| 36. 05 | Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas) |
| 37. 05 | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi |
| 38. 05 | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
| 39. 06 | Jumlah Layanan Perkantoran |
| 40. 06 | Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan |
| 41. 06 | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif |
| 42. 06 | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
| 43. 07 | Jumlah Kendaraan Bermotor |
| 44. 07 | Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi |
| 45. 07 | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |
-

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 3

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

46. 08	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
47. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
48. 09	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
49. 10	Jumlah Gedung/Bangunan

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	429.702.000	
Rincian Output	:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10,00	kegiatan	429.702.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	36,00	orang	224.442.000	
Rincian Output	:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	36,00	orang	224.442.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	205.150.000	
Rincian Output	:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00	operasi	205.150.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
I B. SUMBER DANA**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	859.294.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	859.294.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667794	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	859.294	-	-	-	859.294		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	859.294	-	-	-	859.294		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	859.294	-	-	-	859.294		
5252.AEA	Koordinasi (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	429.702	-	-	-	429.702	34 . 51	
01	RM	-	429.702	-	-	-	429.702	178	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	224.442	-	-	-	224.442	34 . 51	
01	RM	-	224.442	-	-	-	224.442	178	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	205.150	-	-	-	205.150	34 . 51	
01	RM	-	205.150	-	-	-	205.150	178	
JUMLAH		-	859.294	-	-	-	859.294		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

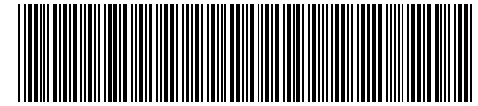
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667794	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	25.246	78.058	48.571	93.841	38.194	145.985	86.628	100.548	56.614	72.536	72.727	40.346	859.294
		BELANJA BARANG	25.246	78.058	48.571	93.841	38.194	145.985	86.628	100.548	56.614	72.536	72.727	40.346	859.294
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	25.246	78.058	48.571	93.841	38.194	145.985	86.628	100.548	56.614	72.536	72.727	40.346	859.294
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	25.246	78.058	48.571	93.841	38.194	145.985	86.628	100.548	56.614	72.536	72.727	40.346	859.294

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
IV A. B L O K I R**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667794] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:4272-2880-2987-7376

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667794] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332